



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 2017

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kuliah Umum

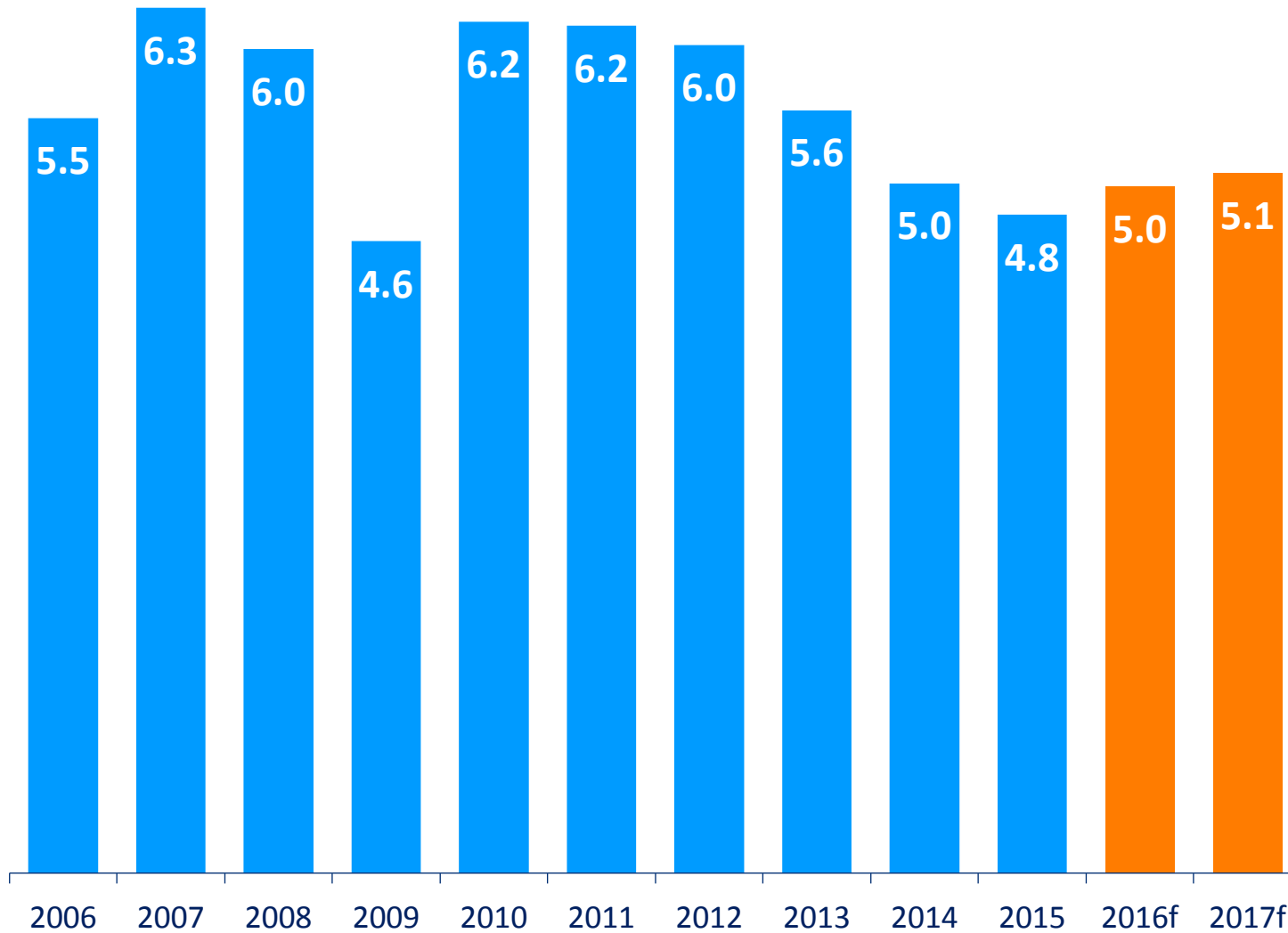
Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia

Jakarta, 19 Januari 2017



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

cukup berdaya tahan di tengah berbagai gejolak



Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh berbagai lembaga:

Bank Indonesia
5,0% - 5,4%

IMF
5,1%

World Bank
5,3%

Consensus Forecast
5,2%

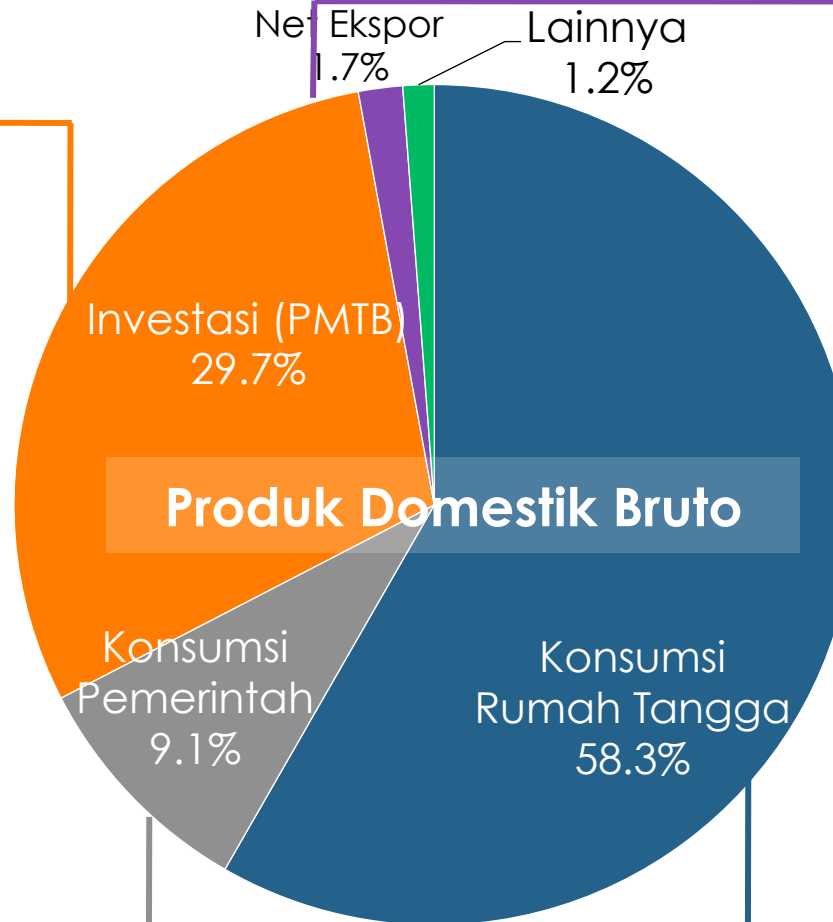
PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PENGELUARAN

Konsumsi RT dan Investasi sebagai *engines of growth*



Investasi (PMTB)

- Rata rata 2006-2015 : **6,8%**
- Pertumbuhan Q3 2016 **4,1%**



Ekspor

- Rata rata 2006-2015 : **5,3%**
- Pertumbuhan Q3 2016 **-6,0%**

Impor

- Rata rata 2006-2015 : **5,1%**
- Pertumbuhan Q3 2016 **-3,9%**

Konsumsi Pemerintah

- Rata rata 2006-2015 : **6,3%**
- Pertumbuhan Q3 2016 **-3,0%**

Konsumsi Rumah Tangga*

- PerRata rata 2006-2015 : **4,9%**
- Pertumbuhan Q3 2016 **5,0%**

* Termasuk LNPRT

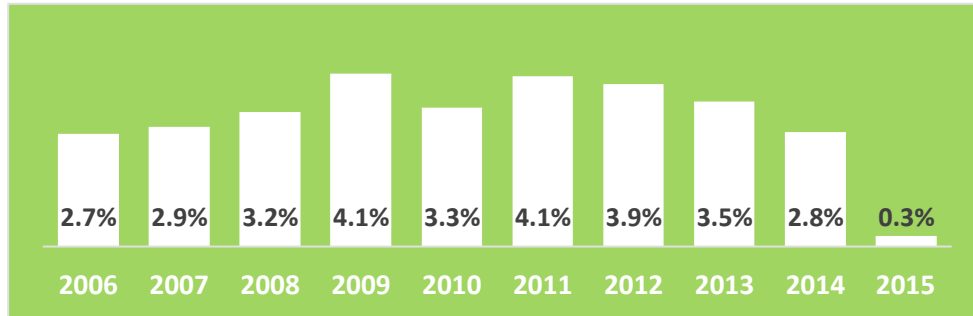
Sumber: BPS, Diolah

PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PRODUKSI

Didukung pertumbuhan sektor jasa yang terus tumbuh tinggi



PRIMER

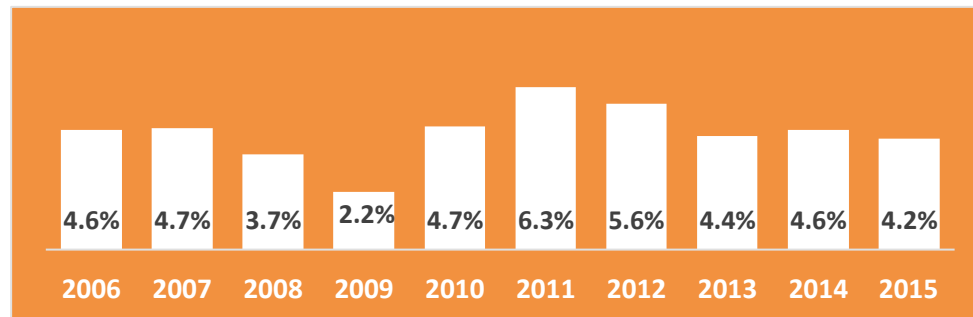


Pertanian, Pertambangan, Perikanan

Distribusi terhadap PDB 2006 - 2015: **23,6%**

- Dipengaruhi oleh harga dan perdagangan **komoditas dunia** yang saat ini cenderung lemah
- Dominan di beberapa daerah (Kalimantan, Papua, Sumatera)

SEKUNDER

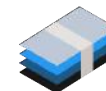
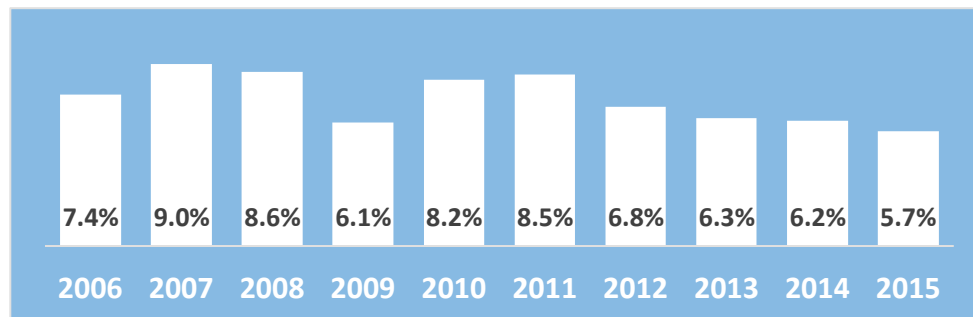


Industri Pengolahan

Distribusi terhadap PDB: **22,0%**

- Diharapkan terus membaik seiring dengan reformasi struktural
- Sektor unggulan **padat karya** yang memiliki nilai tambah yang tinggi
- Sektor yang memiliki porsi tertinggi dalam PDB

TERTIER

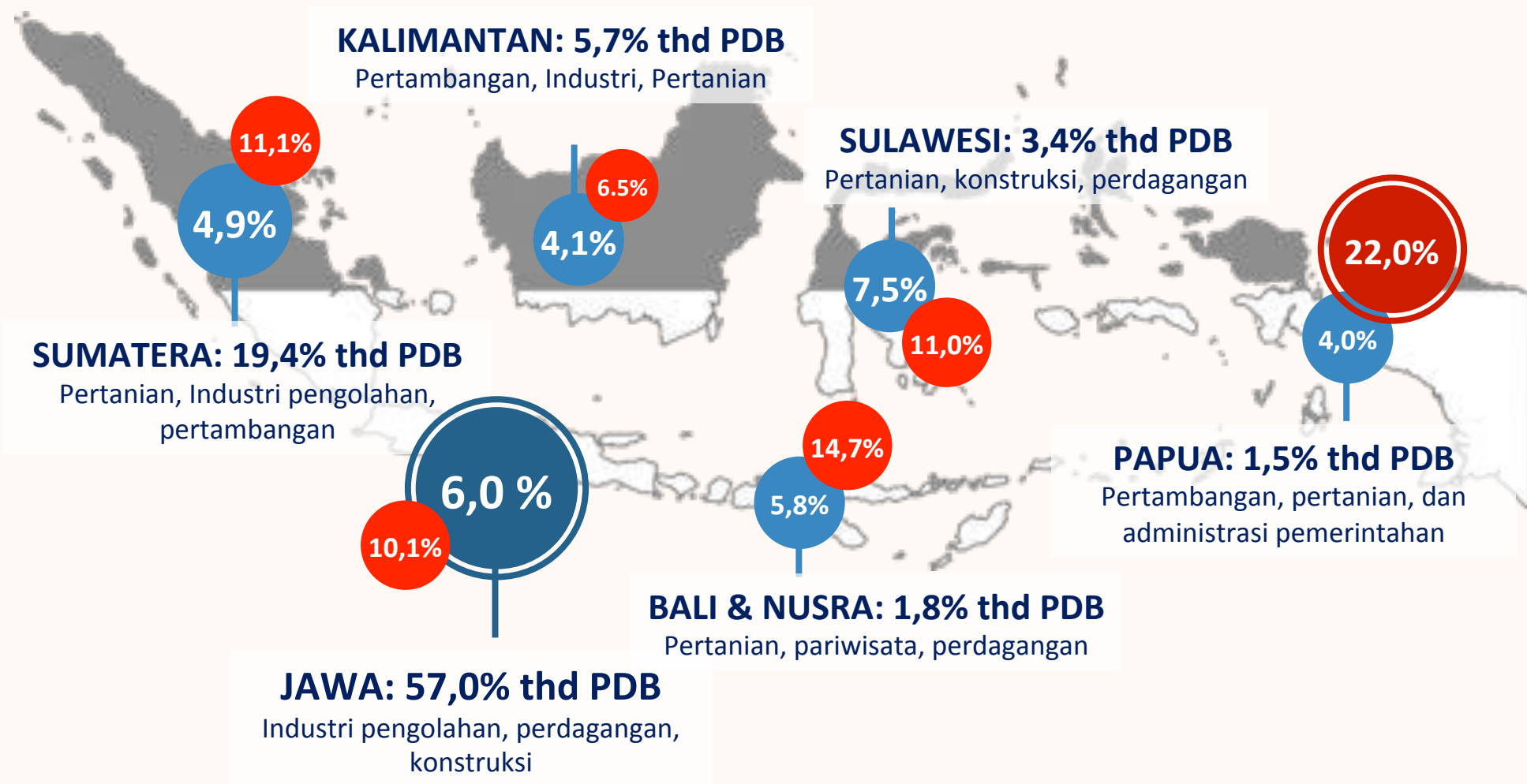



Sektor Jasa (terbagi dalam 14 sektor)

Distribusi terhadap PDB: **51,9%**

- **Tumbuh relatif tinggi dan stabil** dalam beberapa tahun terakhir
- Top pertumbuhan rata-rata sektor: **Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Transportasi & Pergudangan,**

Meski Ekonomi Tumbuh Tinggi DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR



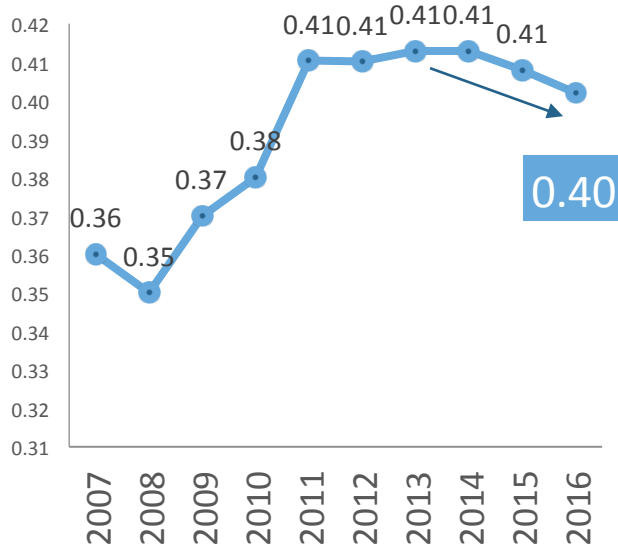
 Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2006-2015, YoY
Source: BPS

 Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016
Source: BPS

PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA, TETAPI...

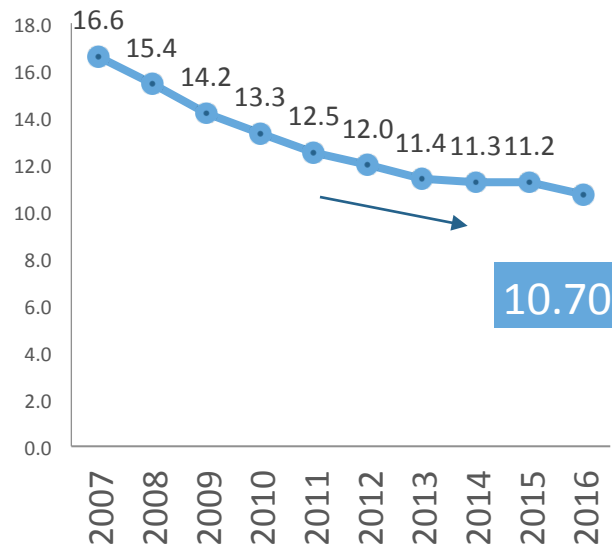


GINI Ratio

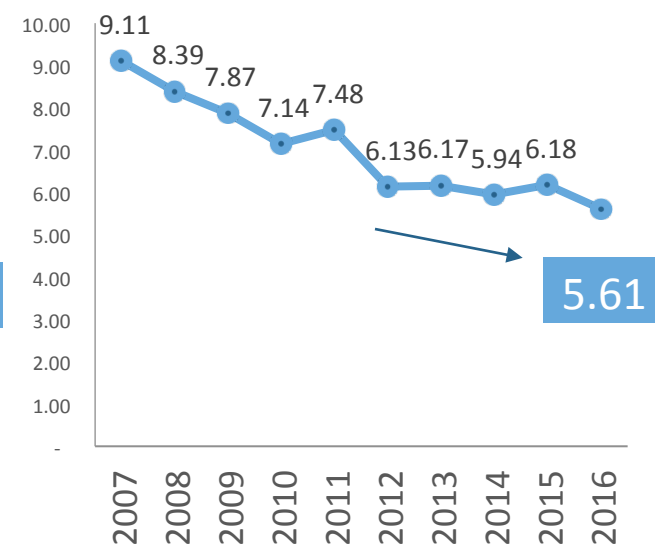


Angka Kemiskinan

sumber: BPS



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

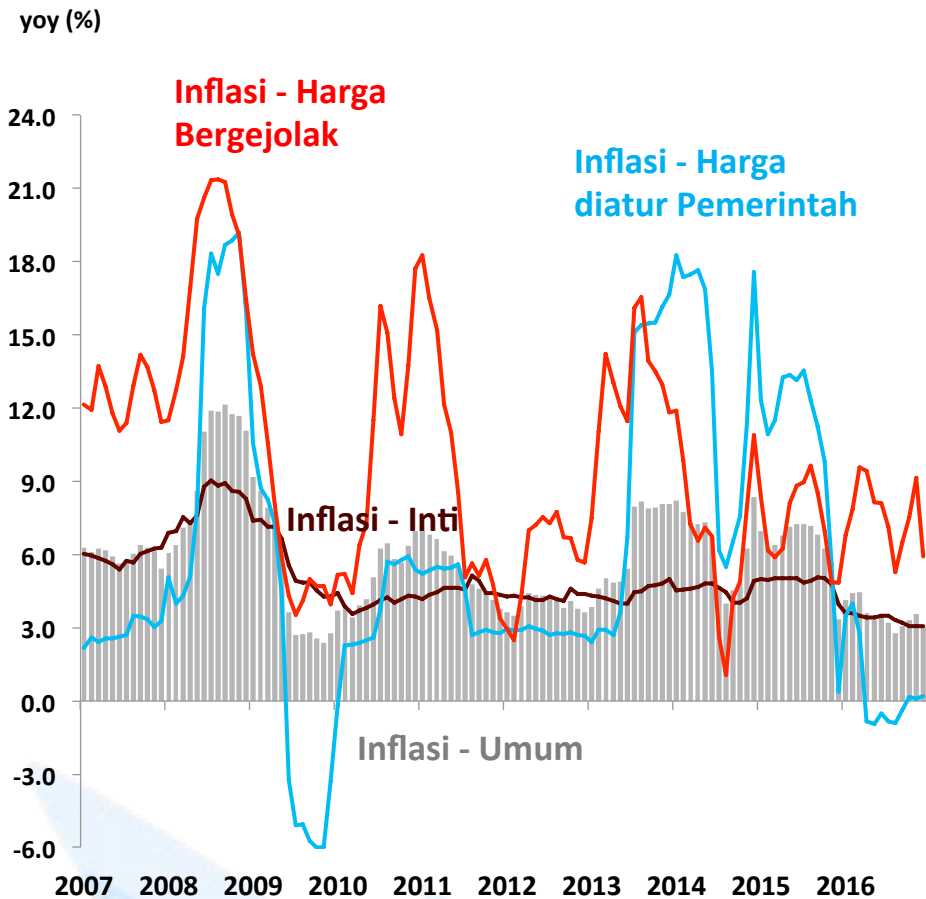




INFLASI SUDAH LEBIH TERKENDALI

Sementara itu tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sudah relatif mereda

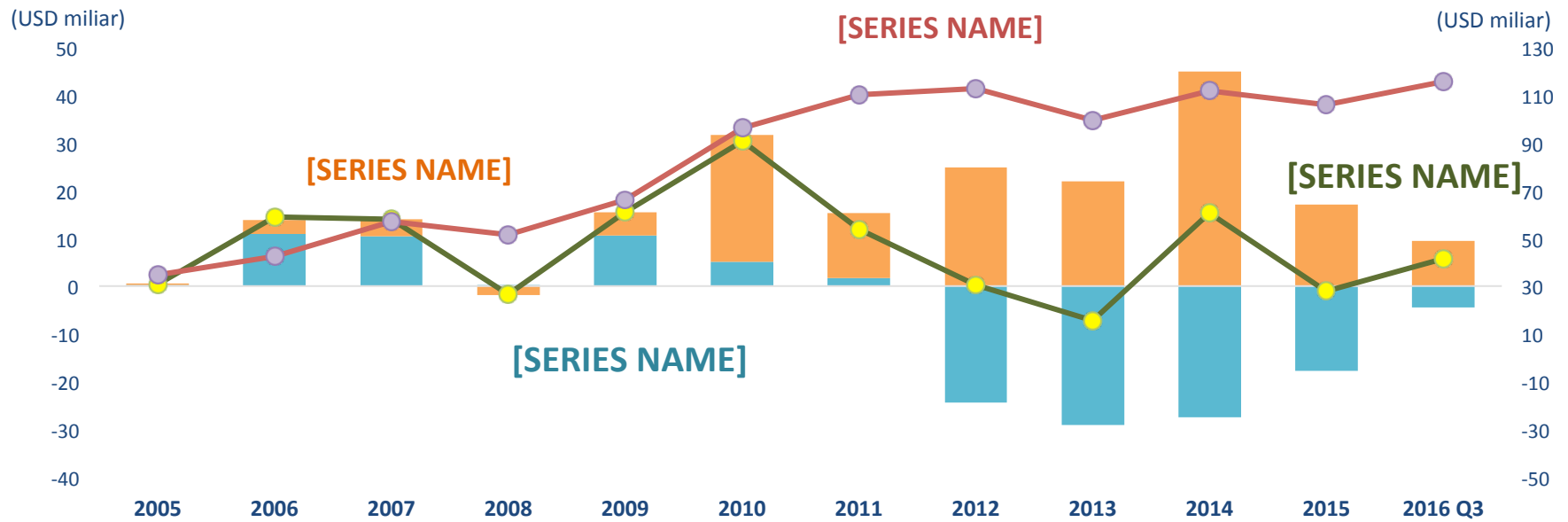
Inflasi (%)



Pergerakan nilai tukar Rupiah thd dolar AS



Kinerja neraca eksternal Indonesia masih menghadapi tantangan baik dari perlambatan pemulihan ekonomi global maupun permintaan domestik



TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR

Mengentaskan Kemiskinan



Mengurangi Ketimpangan



Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkualitas

Meningkatkan Produktivitas



Meningkatkan Daya Saing



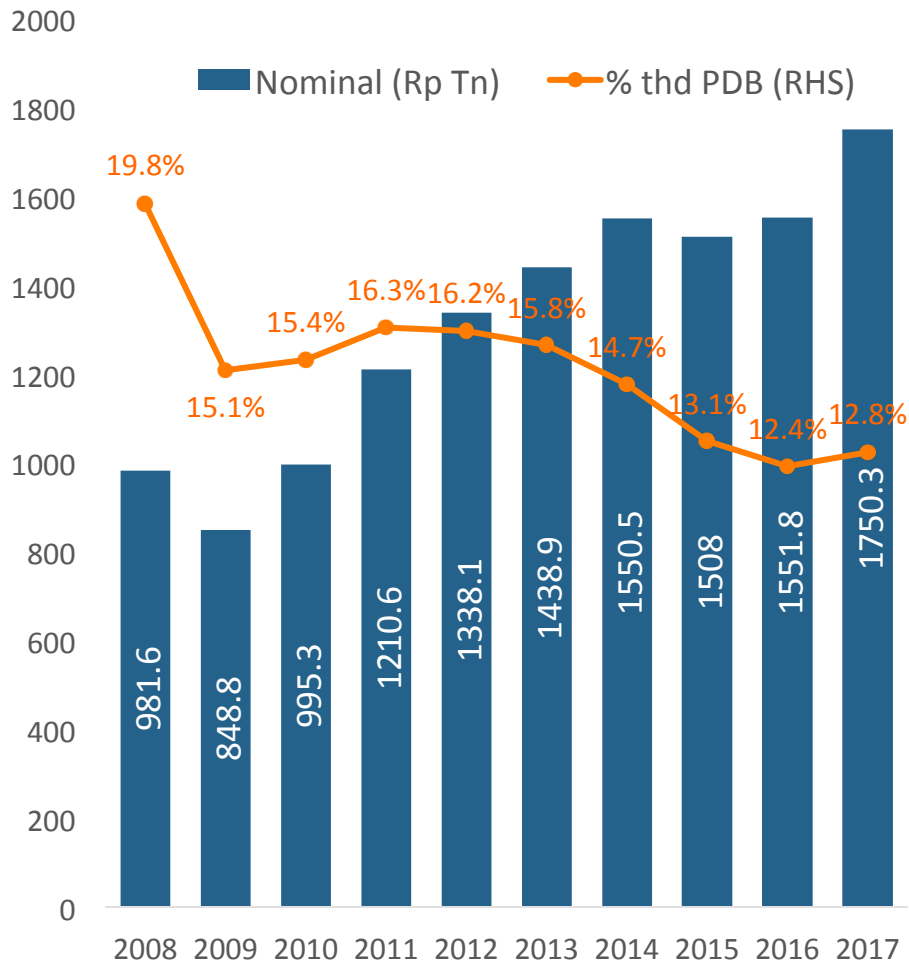
Tata kelola yang baik **Institusi yang bersih & efektif**



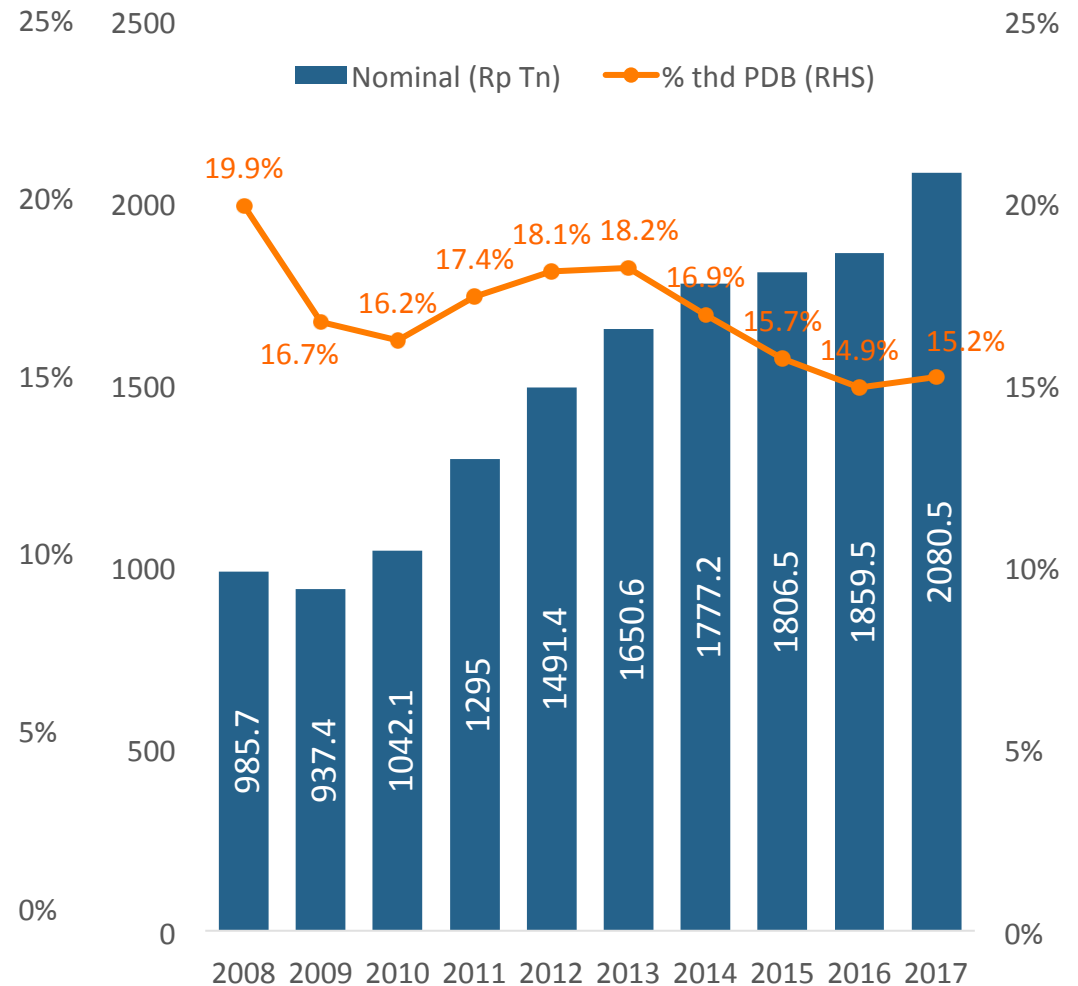
APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan

Pendapatan Negara



Belanja Negara

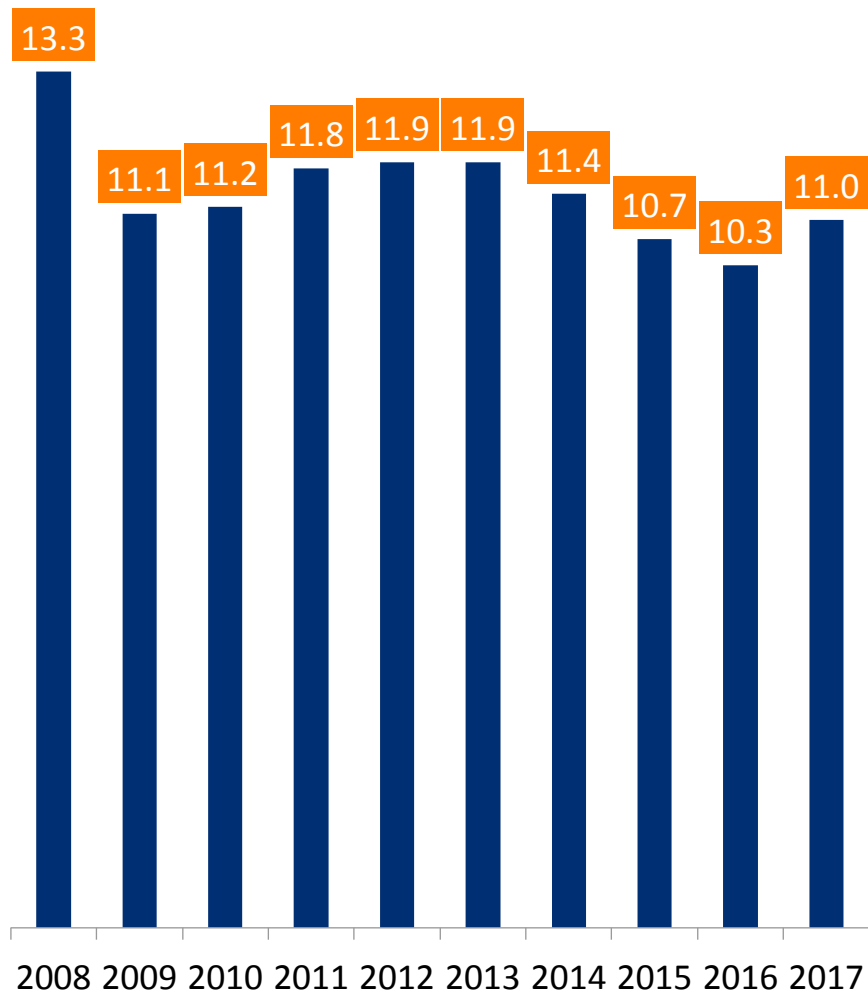




PAJAK ADALAH TULANG PUNGGUNG NEGARA

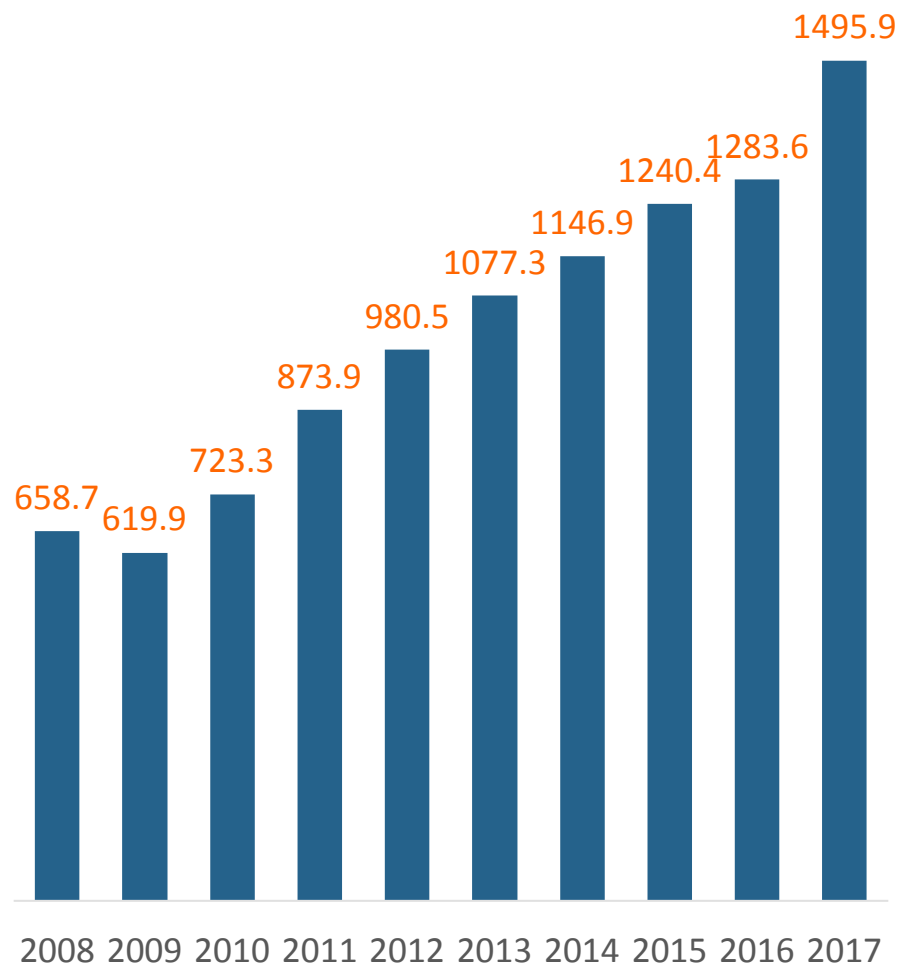
Sumber penerimaan utama dalam APBN

Tax Ratio Indonesia (%)

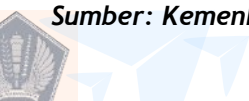


Sumber: Kemenkeu

Penerimaan Perpajakan (Rp Tn)

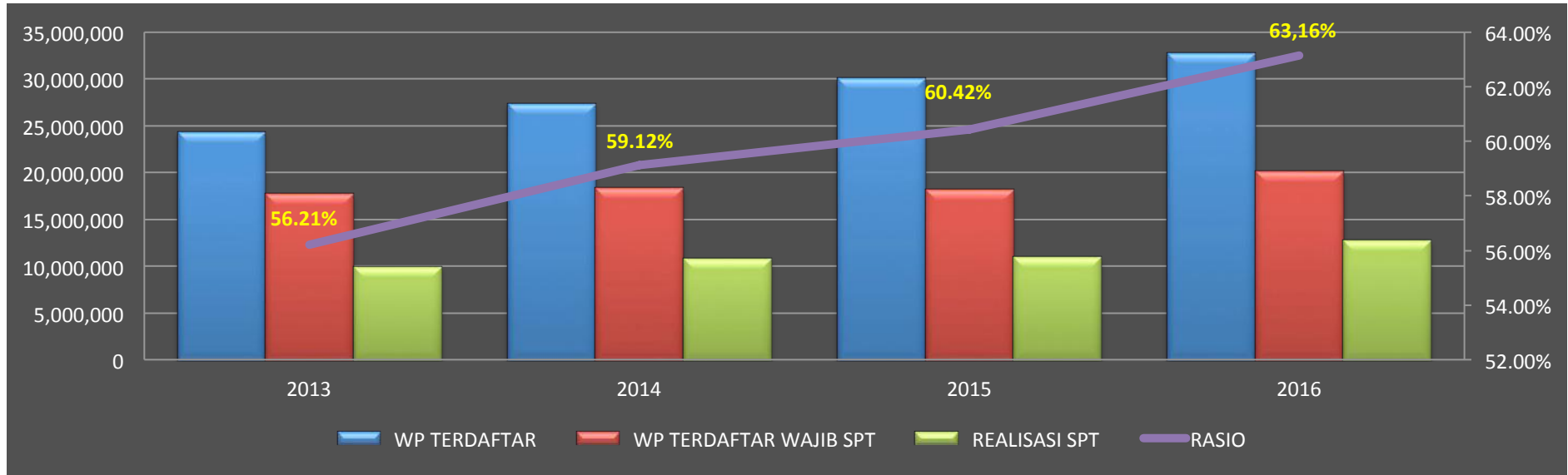


Sumber: Kemenkeu



KEPATUHAN PAJAK MASIH RENDAH

Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas



NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	WP TERDAFTAR	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	WP TERDAFTAR WAJIB SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	TARGET RASIO KEPATUHAN (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	TARGET RASIO KEPATUHAN - SPT (3 x 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	REALISASI SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.737.541
6	RASIO KEPATUHAN (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,16%
7	CAPAIAN RASIO KEPATUHAN (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,12%

Jumlah
Pegawai
pajak
39.980
orang

PAJAK MEMILIKI FUNGSI REDISTRIBUSI

Namun pendapatan pajak masih terkonsentrasi di Jawa

Distribusi per Pulau

PULAU	KALIMANTAN	SULAWESI	PAPUA & MALUKU
PPh & PPN	11,08 T (3,8%)	9,13 T (3,1%)	4,77 T (1,6%)
Dana Transfer	70,9 T (9,7%)	73,8 T (10,1%)	144,7 T (19,7%)
Belanja APBD	108,99 T	85,81 T	64,86 T



PULAU	SUMATERA	JAWA	BALI & NUSA TENGGARA
PPh & PPN	25,75 T (8,8%)	737,65 T (81,3%)	3,96 T (1,4%)
Dana Transfer	207,3 T (28,3%)	198,3 T (27,0%)	38,8 T (5,3%)
Belanja APBD	322,51 T	383,61 T	53,74 T



AMNESTI PAJAK sebuah awal reformasi perpajakan



Uang Tebusan

Nilai aset

Rp **109,8** triliun

Rp **4.314** triliun

Wajib Pajak

627.309 orang

Deklarasi DN Rp**3.160** T

Repatriasi Rp**141** T

Deklarasi LN Rp**1.013** T

Diperkuat dengan
REFORMASI PERPAJAKAN
yang lebih komprehensif

◆ Reformasi Kebijakan



Revisi peraturan perundang-undangan pajak

◆ Reformasi Administrasi

IT, database, SDM, tata kelola









Data hingga 17
Januari 2016

- 3.541m**
jembatan 
- 155 km**
jalan 
- 52.631 ha**
sawah 
- 11.900**
rumah prajurit 
- 9,4 ribu**
gaji guru senior 
- 10 ribu**
Gaji Polri setahun 



belanja pegawai bantuan sosial

-  beras **729 ribu** RTS
-  **93 ribu** ton benih
-  **306 ribu** ton pupuk
-  **2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta** siswa SD/SMP/SMA
-  Rp **355 ribu** keluarga miskin
-  Rp **3,6 juta** PBI orang miskin

PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA



6.765
ruang kelas SD



5.511
ruang kelas SMP



4.182
ruang kelas SMA



50
rumah sakit



23.585org
Tunj.prof guru setahun



24.911org
Tunj.khss guru setahun



**DAK Fisik
BOS**



**tunj.profesi guru
BOK**



1,25 juta
BOS siswa SD/
Ibtidaiyah setahun



1 juta
BOS siswa SMP/
Tsanawiyah setahun



714.286
BOS siswa SMA/
Aliyah setahun



2.018
BOK Puskesmas

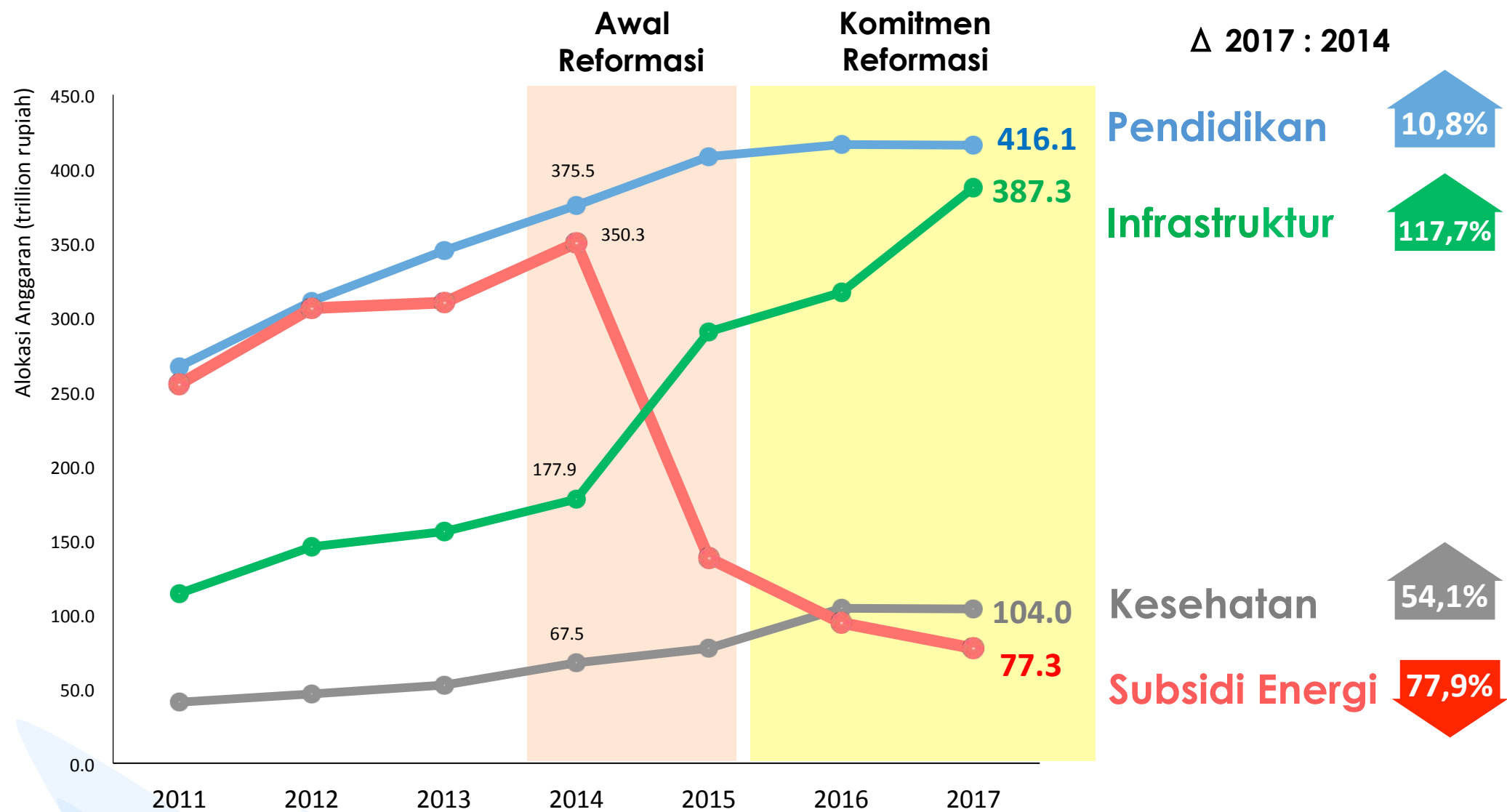


4,2 juta
Jampersal ibu hamil



2.144
Akreditasi RS

KUALITAS ALOKASI BELANJA MEMBAIK SEIRING PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF... namun efektivitas dan efisiensi belanja perlu terus diperbaiki

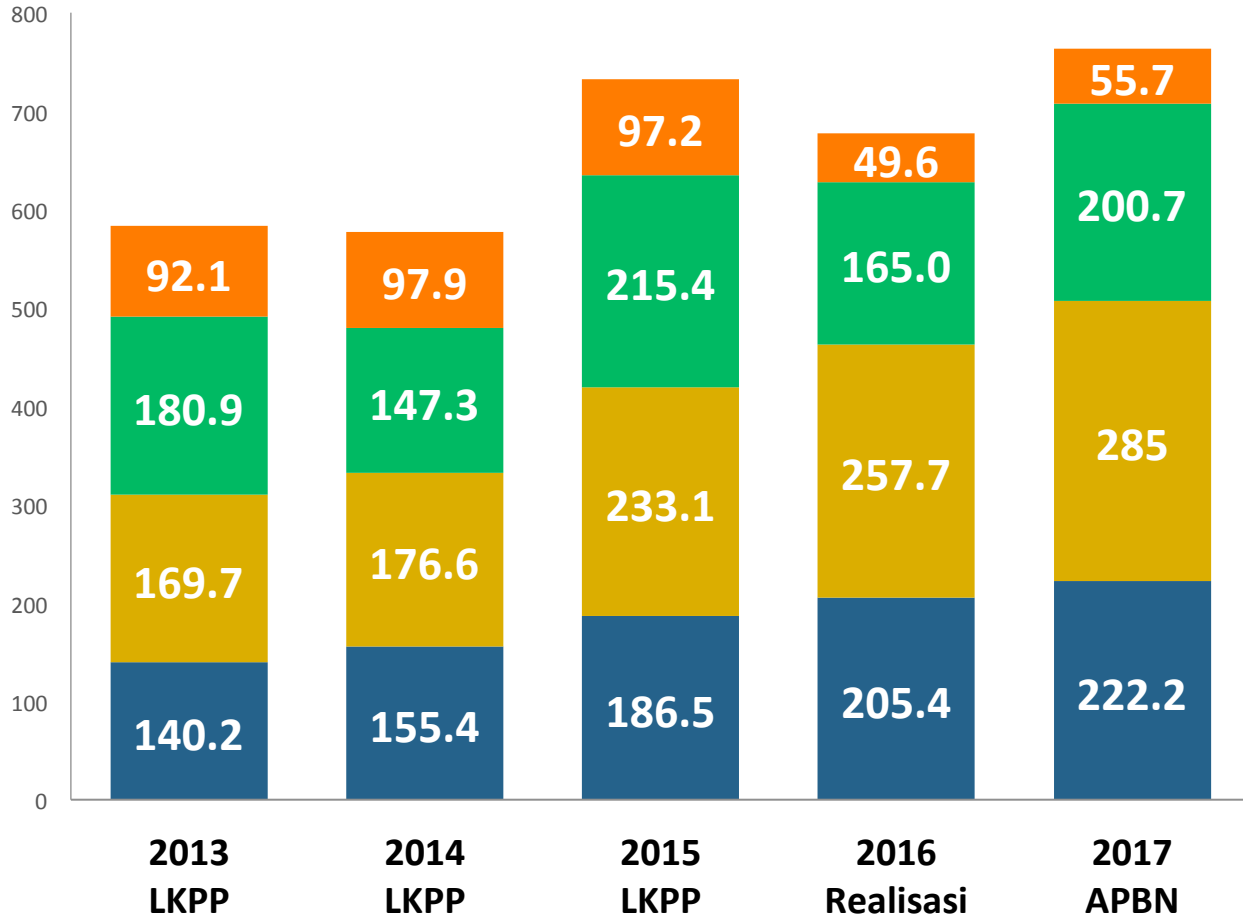


Sumber: MoF

PERTUMBUHAN ALOKASI BELANJA K/L DALAM APBN 2017 LEBIH REALISTIS, NAMUN ALOKASI BELANJA BARANG MASIH DOMINAN DAN BELANJA MODAL MASIH KECIL



% dari Belanja Pemerintah Pusat 2017
(non transfer ke daerah dan dana desa)



4,23%
15,25%

21,66%

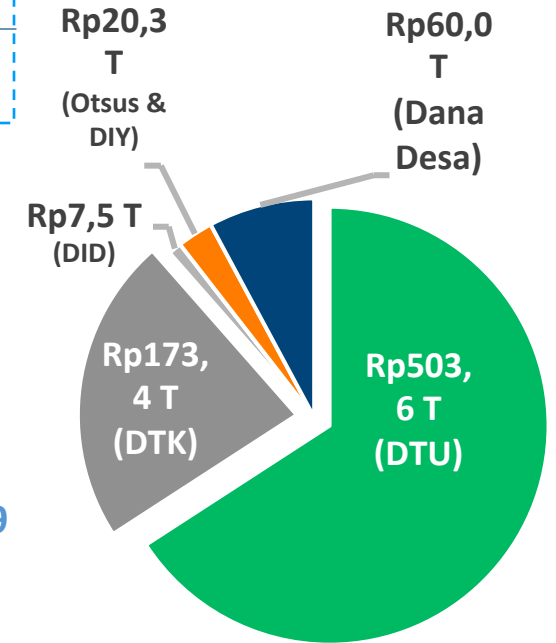
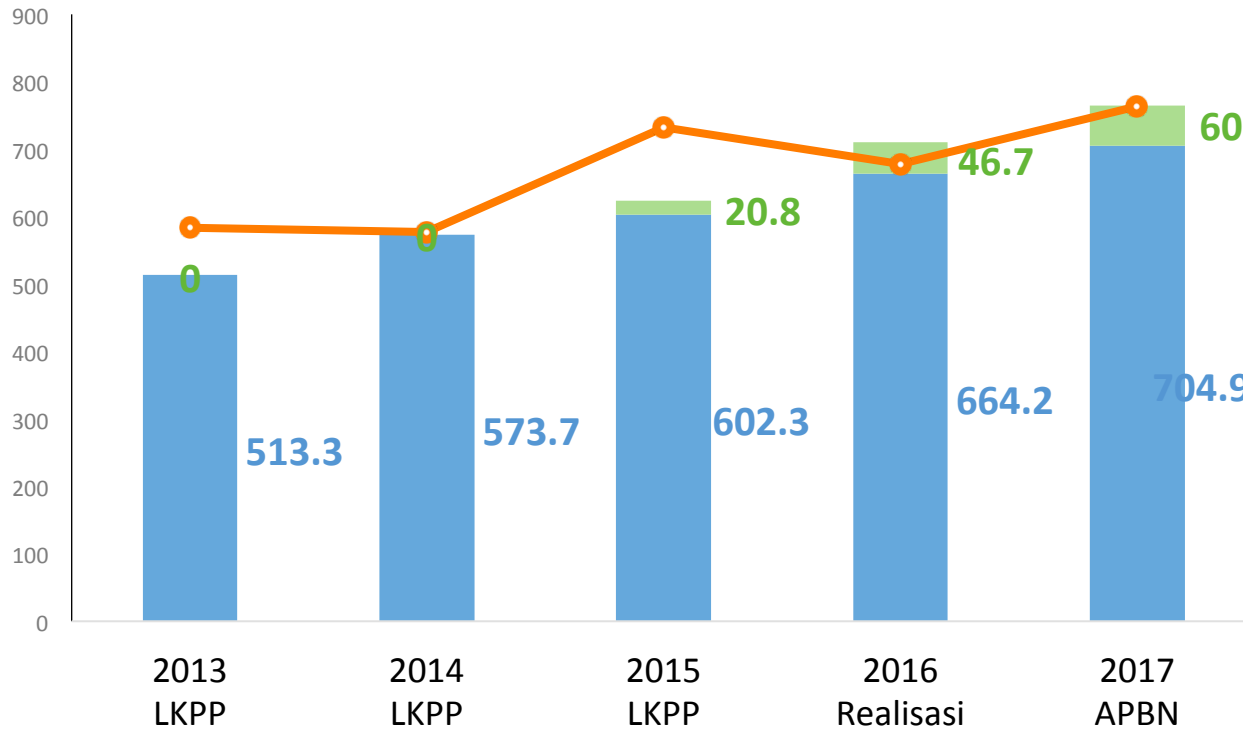
16,89%

■ Pegawai ■ Barang ■ Modal ■ Bansos

PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL

Perimbangan keuangan Pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu memperbaiki kualitas belanja di daerah

Total TKDD	513,3	573,7	623,1	710,9	764,9
Belanja K/L	582,9	577,2	732,1	677,6	763,6



UU APBN TA 2017
minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur

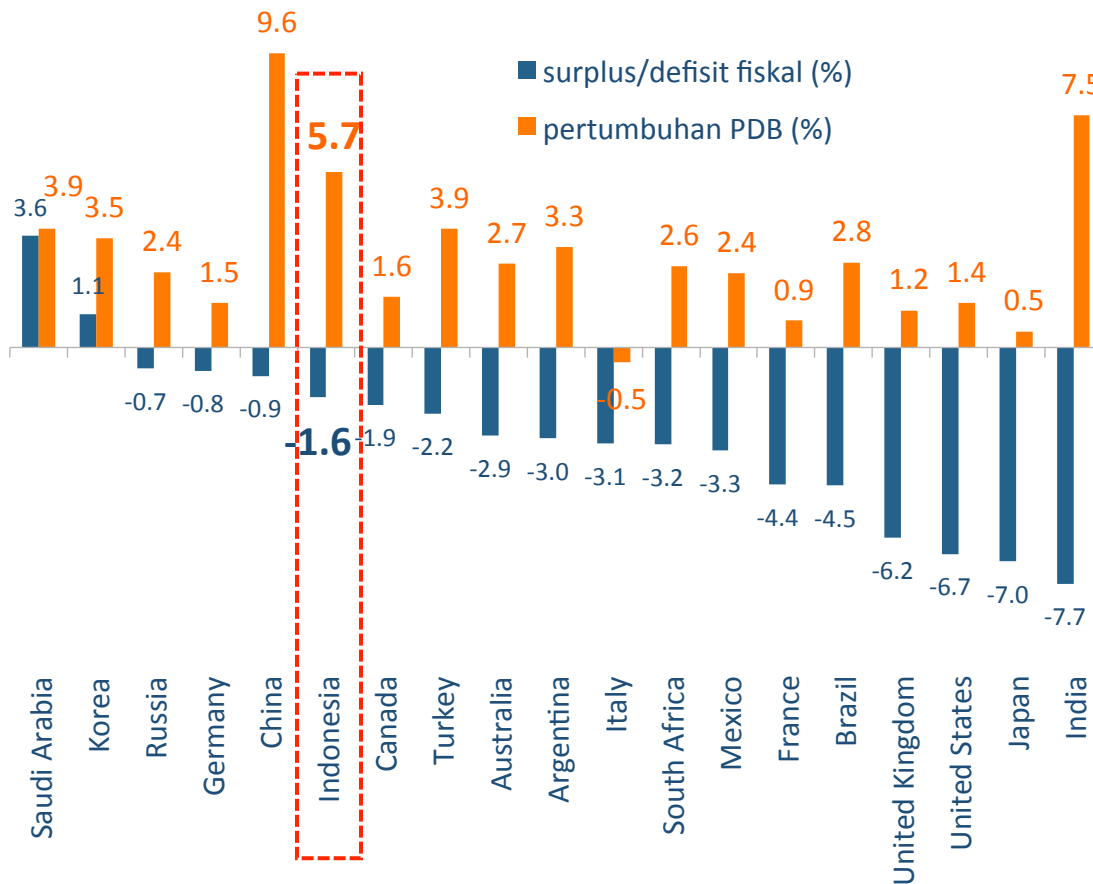
■ Transfer ke Daerah ■ Dana Desa —○— Belanja Kementerian/Lembaga



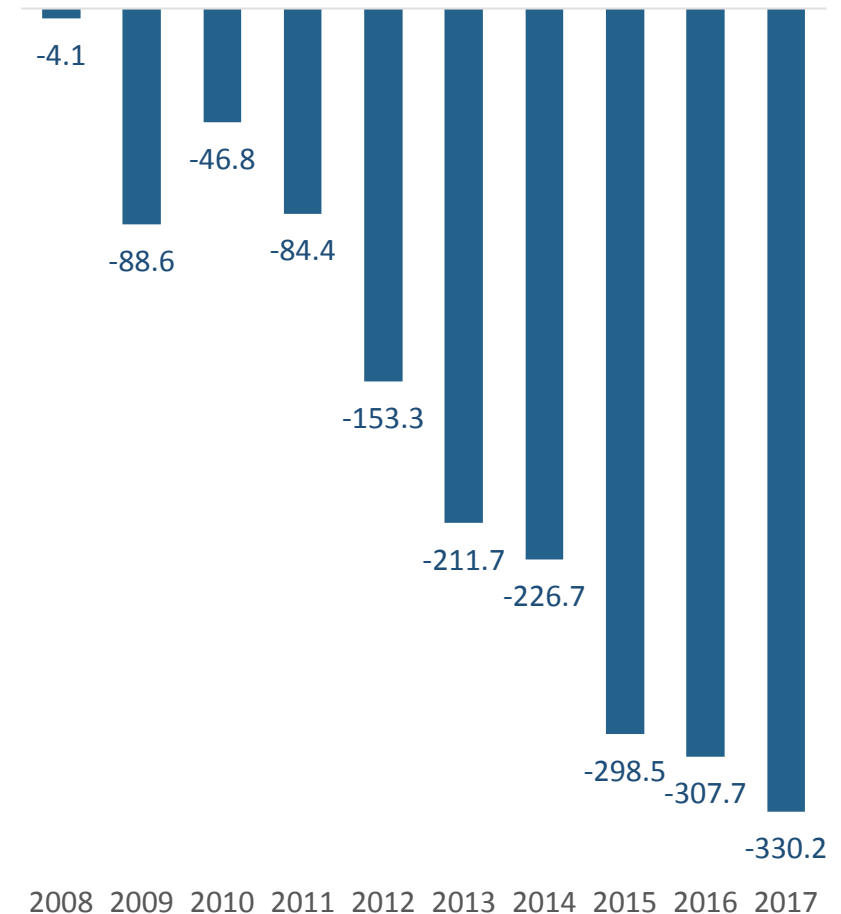
MENJAGA DEFISIT PADA TINGKAT YANG AMAN

dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir



Defisit APBN (Rp Tn)

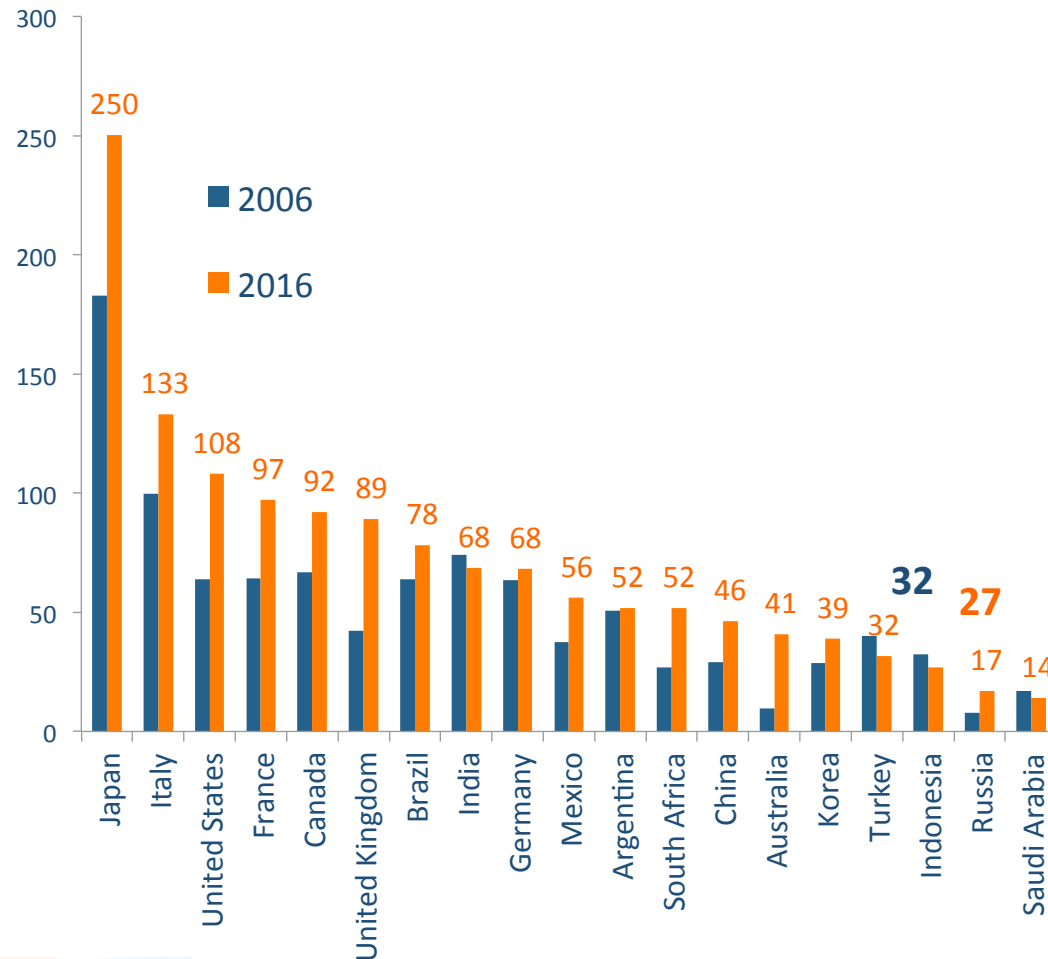


MEMPERKUAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN

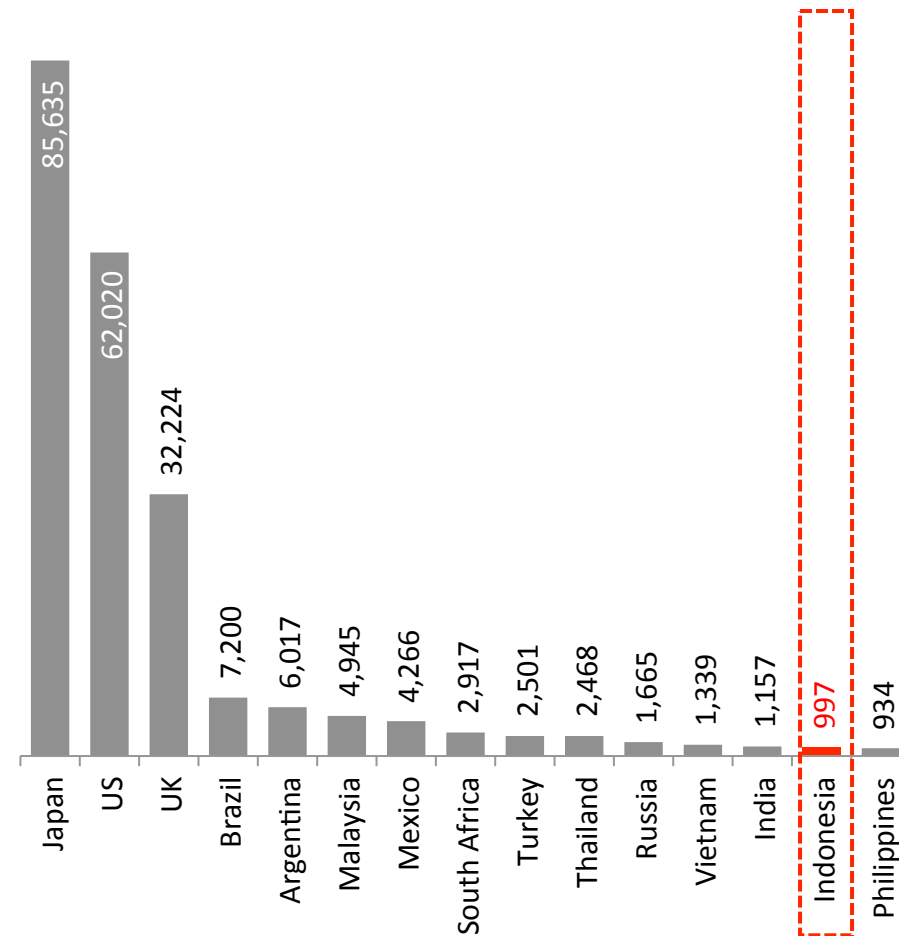
Tingkat utang publik Indonesia salah satu paling rendah



Rasio Utang terhadap PDB (%)



Utang Per Kapita (US\$)



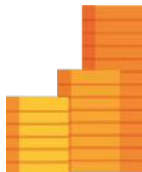
TANTANGAN PENGELOLAAN APBN



Penerimaan Proyeksi & Estimasi



Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel



Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara



Rasio penerimaan perpajakan **masih rendah**



Belanja Komitmen



Membuat keputusan belanja yang strategis



Efektif dan **memperbaiki** fondasi Indonesia



Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan **pemerataan** kesejahteraan



Memerangi inefisiensi dan korupsi



Pembiayaan Terus diperbaiki

Reformasi di Sektor Keuangan, antara lain melalui pendalaman pasar keuangan



Reformasi perpajakan Sangat dibutuhkan



Reformasi belanja menuju efisiensi dan efektifitas

Memperkuat Reformasi Struktural untuk mendorong daya beli dan meningkatkan iklim investasi



1 9 Sept 15

- Deregulasi
- Akselerasi proyek strategis
- Mendorong pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2 29 Sept 15

- Peluncuran program perizinan 3 jam
- Pembebasan PPN untuk industri transportasi
- Fasilitas logistik terintegrasi

3 7 Oct 15

- Penurunan harga BBM dan TDL
- Penyederhanaan izin investasi
- Perluasan basis penerima kredit UMKM

4 15 Oct 15

- Sistem upah yang simpel dan adil
- Kredit UMKM yang mudah dan terjangkau

5 23 Oct 15

- Penurunan pajak revaluasi aset
- Penghapusan pajak berganda REITs

6 5 Nov 15

- Pembangunan KEK
- Perbaikan suplai air bersih
- Penyederhanaan izin impor untuk farmasi

7 4 Dec 15

- Percepatan proses sertifikasi tanah
- Insentif pajak untuk industri padat karya

8 21 Dec 15

- One Map Policy
- Pembangunan pengolahan sumber daya alam (refinery)
- Insentif untuk industri penerbangan

9 27 Jan 16

- Percepatan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan
- Stabilisasi harga daging
- Deregulasi sektor logistik

10 11 Feb 16

- Perbaikan kemudahan berinvestasi (ease of doing business)

11 29 Mar 16

- Insentif kredit usaha REIT berbasis ekspor
- Indonesia Single Risk Mgmt (ISRM)
- Pembangunan industri farmasi

12 28 Apr 16

- Penyederhanaan izin, prosedur, durasi dan biaya memulai bisnis

13 24 Aug 16

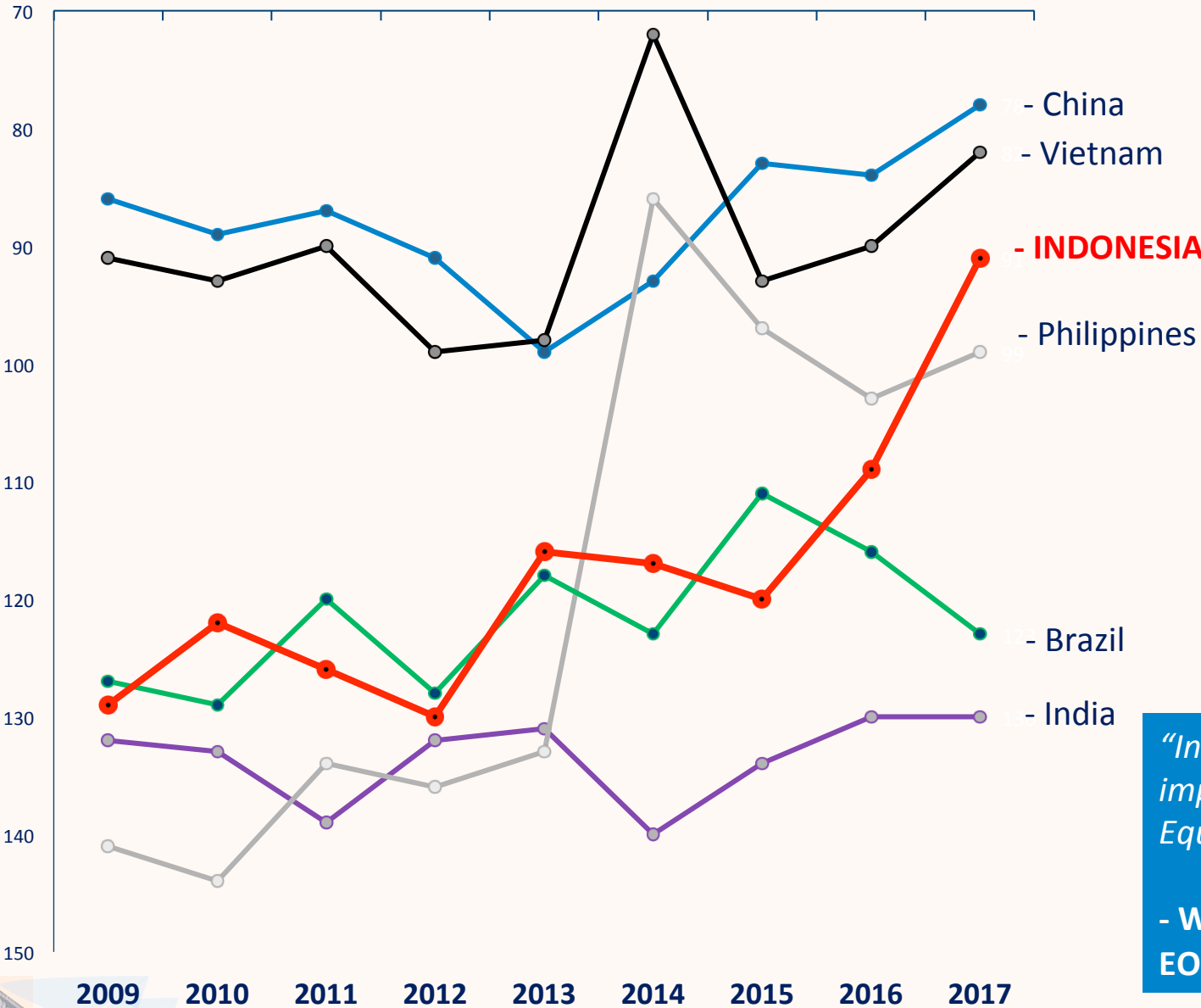
- Percepatan pembangunan rumah murah bagi MBR melalui kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan

14 10 Nov 16

- Pembiayaan E-commerce
- Insentif pajak bagi pelaku usaha digital
- Perlindungan konsumen
- Perbaikan logistik



Pengakuan atas upaya reformasi Indonesia – Perbaikan signifikan posisi **Ease of Doing Business**



#91

Dari 190 negara

Skor: 61,5 (↑3,4)

Melonjak
15 peringkat

2016: #106

2015: #120

“Indonesia is amongst the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All”

- World Bank Group, Press Release EODB 2017

TANTANGAN 2017

Ketidakpastian global



Tingkat permintaan yang lemah

Harga komoditas yang rendah

Economic rebalancing Tiongkok

Isu Geopolitik, e.g. Brexit

Kebijakan ekonomi AS di bawah pemerintahan baru

Kenaikan suku bunga The FED

Pembalikan arus modal dari EMEs



ASUMSI EKONOMI MAKRO	2016 Realisasi	2017 APBN	INDIKATOR KESEJAHTERAAN	2016 Realisasi	2017 Target	
<h2 data-bbox="20 199 497 371">Pertumbuhan Ekonomi</h2> <p data-bbox="352 314 497 371">(% , yoy)</p> <p data-bbox="20 385 652 471">IMF 5.1%, World Bank 5.3%, ADB 5.1%, Bloomberg Consensus 5.3%, Bank Indonesia 5,0 – 5,4%</p>	5,0*	5,1	<p data-bbox="1139 214 1636 271">Tingkat Pengangguran (%)</p> <p data-bbox="1139 371 1554 428">Angka Kemiskinan (%)</p> <p data-bbox="1139 528 1471 585">Gini ratio (indeks)</p> <p data-bbox="1139 685 1554 771">Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p data-bbox="1719 214 1802 271">5,61</p> <p data-bbox="1719 371 1823 428">10,70</p> <p data-bbox="1719 528 1823 585">0,397</p> <p data-bbox="1719 685 1802 742">70,1</p>	<p data-bbox="1885 214 2051 271">5,3 – 5,6</p> <p data-bbox="1885 371 2051 428">9,5 – 10,5</p> <p data-bbox="1926 528 2009 585">0,38</p> <p data-bbox="1926 685 2030 742">70,11</p>	
<h3 data-bbox="20 556 145 614">Inflasi</h3> <p data-bbox="20 599 124 642">(% , yoy)</p>	3,02	4,0	<p data-bbox="1139 871 1781 928">Kunci utama pertumbuhan:</p> <ul data-bbox="1139 942 2051 1356" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1139 942 2051 1170">• Memperkuat ekonomi domestik melalui stabilitas konsumsi, peningkatan investasi, dan ekspansi belanja pemerintah yang efektif <li data-bbox="1139 1185 2051 1356">• Meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk mendukung perbaikan ekspor 			
<h3 data-bbox="20 699 290 756">SPN 3 Bulan</h3> <p data-bbox="20 742 186 785">(rata-rata %)</p>	5,7	5,3				
<h3 data-bbox="20 842 435 899">Nilai Tukar Rupiah</h3> <p data-bbox="20 885 124 928">(Rp/US\$)</p>	13.307	13.300				
<h3 data-bbox="20 985 103 1042">ICP</h3> <p data-bbox="20 1028 165 1071">(US\$/barrel)</p>	40	45				
<h3 data-bbox="20 1128 331 1185">Lifting Minyak</h3> <p data-bbox="20 1170 269 1213">(ribuan barrel/hari)</p>	829	815				
<h3 data-bbox="20 1270 248 1328">Lifting Gas</h3> <p data-bbox="20 1313 559 1356">(setara dengan ribuan barrel minyak/hari)</p>	1.184	1.150				

Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017

Deksripsi (Triliun Rupiah)		2016				2017	
		APBN-P	Outlook	Realisasi Sementara	Realisasi thd Outlook	APBN	Pertumbuhan thd realisasi 2016
A.	Pendapatan Negara	1.786,2	1.582,9	1.551,8	98,0%	1.750,3	12,8%
	I. Penerimaan Dalam Negeri	1.784,2	1.580,9	1.546,0	97,8%	1.748,9	13,1%
	1. Penerimaan Pajak	1.539,2	1.320,2	1.283,6	97,2%	1.498,9	16,8%
	2. PNBP	245,1	260,7	262,4	100,7%	250,0	-4,7%
	II. Hibah	2,0	2,0	5,8	290,0%	1,4	-75,9%
B.	Belanja Negara	2.082,9	1.898,6	1.859,5	97,9%	2.080,5	11,9%
	I. Pemerintah Pusat	1.306,7	1.195,3	1.148,6	96,1%	1.315,5	14,5%
	1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	767,8	672,0	677,6	100,8%	763,6	12,7%
	2. Belanja Non K/L	538,9	523,3	471,0	90,0%	552,0	17,2%
	II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	776,3	703,3	710,9	101,1%	764,9	7,6%
	1. Transfer Ke Daerah	729,3	659,1	664,2	100,8%	704,9	6,1%
	2. Dana Desa	47,0	44,2	46,7	105,7%	60,0	28,5%
C.	Keseimbangan Primer	(105,5)	(126,4)	(124,9)	98,8%	(109,0)	-12,7%
D.	Surplus/Defisit	(296,7)	(315,7)	(307,7)	97,5%	(330,2)	7,3%
	% terhadap PDB	(2,35)	(2,50)	(2,46)	98,4%	(2,41)	-2,0%
E.	Pembiayaan	296,7	315,7	330,3	104,6%	330,2	0,0%
	I. Pembiayaan Utang	371,6	387,8	n/a	n/a	384,7	n/a
	II. Pembiayaan Investasi	(94,0)	(91,5)	n/a	n/a	(47,5)	n/a
	III. Pembiayaan Lainnya	19,1	19,4	n/a	n/a	(7,0)	n/a

PRIORITAS STRATEGIS 2017



1

Akselerasi pembangunan infrastruktur, baik dari APBN, BUMN dan Swasta

2

Efektivitas Belanja daerah dan Dana Desa.

Untuk mengurangi kemiskinan
Menciptakan kesempatan kerja
Mengurangi kesempatan

3

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN guna mendukung ekonomi dan pembangunan inklusif



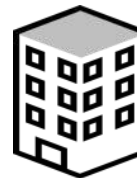
Mendukung
Daya Beli

- Gaji/Pensiun
(2017: **Rp343,4 T**)
- Subsidi Masyarakat / transfer keluarga miskin
(2017: **Rp204,6 T**)



Investasi
membangun produktivitas dan daya saing

- belanja infrastruktur
(2017: **Rp387,7 T**)
- belanja pendidikan (20% APBN)
- belanja kesehatan (5% APBN)
- belanja riset/litbang
(2017: **Rp12,8 T**)



Membangun
institusi

- belanja legislatif (DPR, DPD, MPR)
(2017: **Rp6,1 T**)
- Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia)
(2017: **Rp8,4 T**)
- Eksekutif (Pusat, Pemda)



Menjaga
stabilitas dan keamanan

- Belanja Kemhan/TNI
(2017: **Rp108 T**)
- Belanja POLRI
(2017: **Rp84 T**)

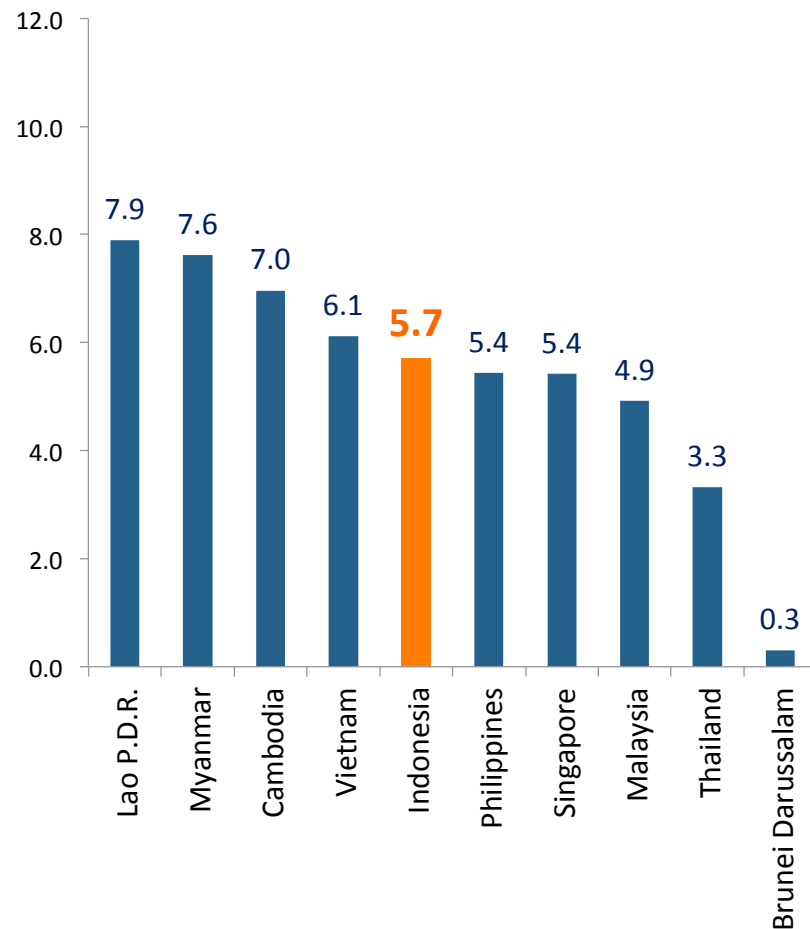
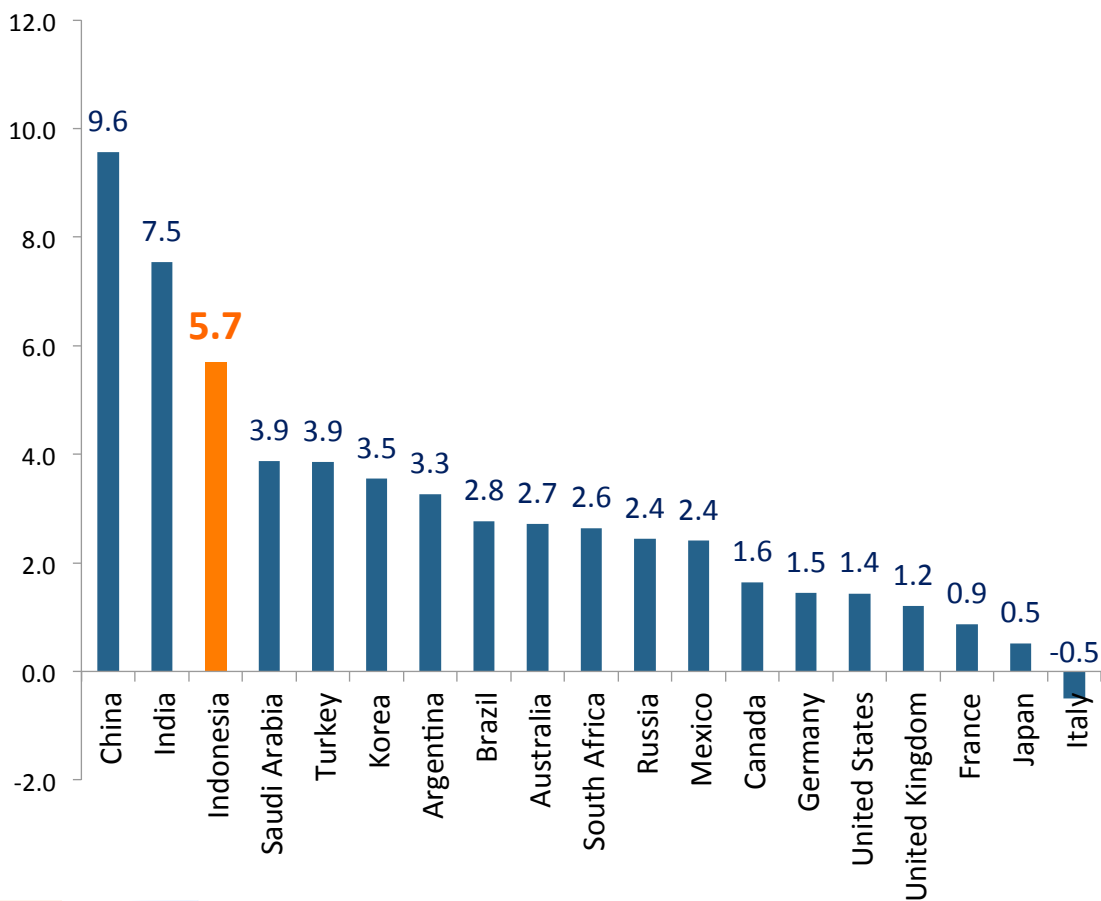
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia MASIH LEBIH BAIK Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia



Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (% ,yoy)

Negara – Negara G20 & BRICS

Negara – Negara ASEAN

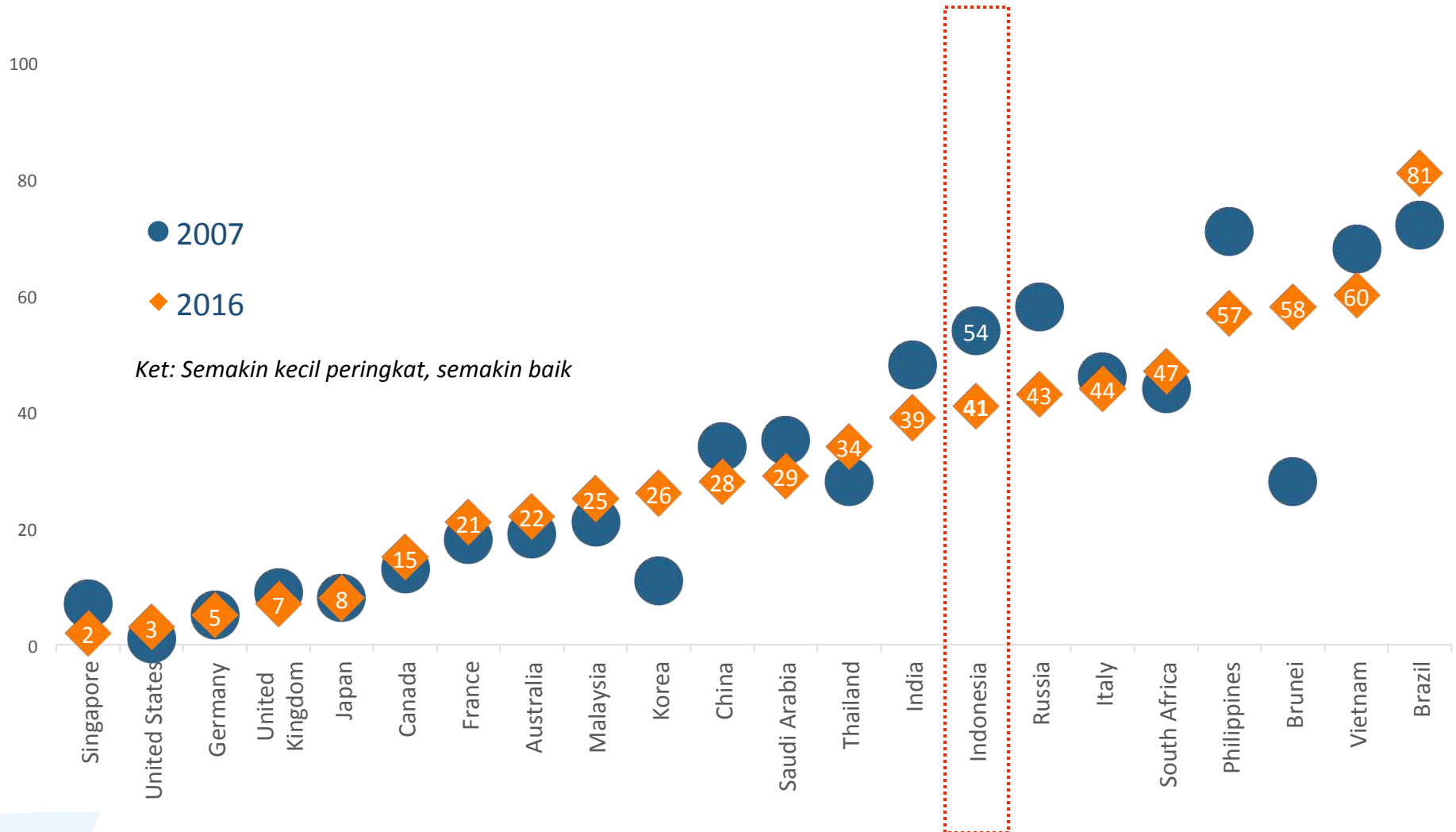


Sumber: IMF & BPS

Namun beberapa hal masih perlu untuk diperbaiki a.l. DAYA SAING INDONESIA



Peringkat Global Competitiveness Index



Kebijakan Ekonomi yang Tepat Sasaran, Efektif, dan Berefek

Berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

#1

Lembaga Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Efektif

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

#2

INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR

#3

Keterbukaan Pikiran dalam Menerima Keragaman

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

#4

Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi



TERIMA KASIH

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kuliah Umum

Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia

Jakarta, 19 Januari 2017